

**EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK ALAT KESEHATAN
DI PUSKESMAS BIARO KABUPATEN AGAM
TAHUN 2010**

Skripsi

Diajukan ke Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

PUTERI FANNYA

NO. BP 07122025



**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2011**

ABSTRAK

Manajemen logistik alat kesehatan adalah suatu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat kesehatan. Puskesmas Biaro telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen logistik ini namun masih terdapat beberapa masalah yaitu tenaga pelaksana yang kurang, penumpukan barang yang rusak di gudang, dan pemberian kode barang yang belum terlaksana seluruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro Kabupaten Agam.

Desain penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan di Puskesmas Biaro dari bulan Januari sampai Juni 2011 dengan informan berjumlah 5 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan (observasi), wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Data diolah dengan mereduksi dalam bentuk matrik hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk narasi serta dianalisis dengan pendekatan analisis isi dengan cara triangulasi data.

Hasil penelitian untuk pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan belum ada petugas khusus yang ditunjuk untuk pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan alat dipegang oleh petugas laboratorium. Dana berasal dari APBD melalui Dinas Kesehatan. Sarana dan prasarana sudah cukup terdiri dari gudang tempat penyimpanan, lemari kabinet di setiap ruangan, dan kendaraan untuk pendistribusian alat. Metode yang digunakan mengacu pada Keputusan Kepmendagri Nomor 152 Tahun 2004. Untuk komponen proses mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. Perencanaan dilakukan berdasarkan permintaan kebutuhan oleh puskesmas induk, pustu, dan polindes. Puskesmas belum melakukan penganggaran kebutuhan. Pengadaan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Penyimpanan dilakukan di gudang penyimpanan, dan dalam lemari kabinet untuk alat yang ada di ruangan. Pendistribusian diutamakan untuk puskesmas induk. Pemeliharaan belum berjalan dengan baik. Realisasi penghapusan belum dilaksanakan. Pengendalian dilaksanakan dengan inventarisasi menggunakan KIB dan KIR. Sedangkan komponen keluaran yaitu tersedianya alat kesehatan yang siap pakai masih ditemukan beberapa alat yang belum berfungsi optimal.

Pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro masih belum berjalan maksimal. Masih terdapat beberapa fungsi manajemen logistik yang belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama dari pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mendukung pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan agar dapat berjalan dengan baik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, disebutkan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.²

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025, pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).³

Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan strata pertama dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, terutama upaya preventif dan promotif, namun juga tidak meninggalkan upaya kuratif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.²

Salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya penyembuhan penyakit (kuratif) di puskesmas adalah peralatan kesehatan. Tidak tersedianya peralatan atau peralatan yang ada tidak digunakan dengan baik oleh Puskesmas akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.⁴ Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan.⁵

Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 98 dan 104 menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat serta pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.⁶

Kepmenkes No. 004 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan strategis adalah upaya penataan manajemen kesehatan di era desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan tersebut adalah mengembangkan sub sistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan alat kesehatan. Dalam langkah kunci 28 Kepmenkes tersebut di atas dinyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat tercapai bila tersedia biaya operasional dan pemeliharaan

sarana dan alat kesehatan yang memadai dan untuk itu haruslah disusun petunjuk teknis dan *standart operational procedure* (SOP) tentang pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana alat kesehatan.⁷

Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen logistik yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan pada masyarakat, mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi tentang hal ini, khususnya mengenai logistik obat dan alat kesehatan. Yuliningsih (2001) dalam penelitiannya mengenai sistem pengelolaan perbekalan obat / alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menyebutkan bahwa ketidakterediaan obat/alkes persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM, sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan/pengendalian.⁸

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kalterina (2002) yang menyebutkan bahwa perencanaan obat dan alat kesehatan kebutuhan dasar ruangan pada instalasi rumah sakit tidak akurat yang disebabkan adanya hambatan yang terjadi pada SDM, organisasi, kebijakan, prosedur, laporan pemakaian obat dan alat kesehatan, penentuan perencanaan jumlah obat dan alat kesehatan dasar ruangan.⁹

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan manajemen logistik khususnya obat dan alat kesehatan merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait antar fungsi-fungsinya. Perencanaan dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu pada masyarakat.

Puskesmas Biaro merupakan salah satu puskesmas non perawatan yang ada di Kabupaten Agam yang melaksanakan upaya kesehatan preventif, promotif, dan kuratif pada masyarakat. Puskesmas Biaro mempunyai wilayah kerja seluas 33,01 km² yang terdiri dari 7 nagari dengan 33 jorong. Puskesmas Biaro pernah mendapatkan penghargaan Puskesmas Berprestasi Tingkat Kabupaten tahun 2008 dan melaksanakan sistem manajemen logistik khususnya alat kesehatan agar dapat mencapai pelayanan yang prima.¹⁰ Namun dalam pelaksanaan selanjutnya apakah sistem ini tetap dipertahankan sampai saat ini sesuai dengan peraturan yang terkait dengan manajemen logistik.

Berdasarkan hasil survei awal, peralatan kesehatan yang ada di Puskesmas Biaro sudah dikatakan lengkap. Namun dari data yang didapatkan masih banyak alat kesehatan yang ditumpuk di gudang barang. Peralatan yang ada di dalam gudang tersebut terdiri dari alat kesehatan yang keadaannya masih baik, dan juga ada yang telah rusak. Berdasarkan data inventaris puskesmas tahun 2010 dari 115 unit alat kesehatan yang terdapat di gudang barang, 50 unit alat kesehatan dalam keadaan baik, 64 unit alat kesehatan dalam keadaan rusak berat, dan 1 unit alat kesehatan dalam keadaan rusak ringan. Peralatan yang dalam keadaan baik disimpan dalam gudang sebelum dilakukan pendistribusian. Sedangkan peralatan yang rusak berat ditumpuk di gudang karena tidak ada proses penghausan terhadap barang-barang tersebut. Peralatan yang rusak tersebut diantaranya adalah timbangan badan, tensimeter, mikroskop, lampu sorot, timbangan dan pengukur tinggi badan, timbangan bayi, dan HB sahli. Banyaknya peralatan yang dalam keadaan rusak di gudang barang dapat mengurangi ruangan yang tersedia untuk menyimpan peralatan baru yang keadaannya masih baik, akibatnya peralatan yang disimpan tidak disusun dengan rapi. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam

pengambilan ketika peralatan dibutuhkan karena letaknya yang tidak teratur tersebut, sehingga akan mempengaruhi pada proses pelayanan.¹¹

Selain penumpukan barang di gudang, masalah yang ditemukan di Puskesmas Biaro adalah masih banyak peralatan kesehatan yang tidak diberi nomor kode barang. Berdasarkan data inventaris puskesmas tahun 2010 dari 221 alat kesehatan yang ada di tujuh ruang puskesmas yaitu: ruang poli gigi, ruang imunisasi, ruang labor, ruang KIA, ruang poli umum, ruang Unit Gawat Darurat (UGD), dan Ruang Keluarga Berencana (KB), 106 diantaranya belum diberi kode barang. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, setiap barang-barang inventaris milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus diberi kode barang dalam rangka kegiatan Sensus Barang. Banyaknya barang yang belum diberi kode ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dari petugas pengelola barang yang juga mempunyai tugas di laboratorium.¹¹

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada survei awal dengan petugas laboratorium yang juga merangkap sebagai petugas pengelola barang diketahui bahwa, sistem pemeliharaan dan penghapusan barang belum berjalan dengan baik. selain itu, tidak adanya petugas khusus yang mengelola peralatan kesehatan sehingga pengelolaan tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Biaro Kabupaten Agam Tahun 2010.

1.2. Fokus Penelitian

Penulis membatasi permasalahan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro yang dilihat dari input (tenaga, dana, sarana dan prasarana, dan metode), proses kegiatan pelaksanaan manajemen logistik alat

kesehatan yaitu (perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian). Alat-alat kesehatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah alat-alat kesehatan yang tidak habis pakai yang terdapat di Puskesmas Biaro.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro Kabupaten Agam ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan Di Puskesmas Biaro.

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran masukan (*input*) manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro yang meliputi aspek tenaga, dana, sarana dan prasarana, dan metode.
- b. Mengetahui gambaran proses (*process*) manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Biaro yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
- c. Mengetahui gambaran keluaran (*out put*) penggunaan alat kesehatan yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan, khususnya mata kuliah manajemen logistik yang diperoleh pada perkuliahan ke dalam suatu penelitian.
- b. Diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu dan menjadi bahan rujukan bagi dunia pendidikan dalam menetapkan kurikulum pendidikan khususnya manajemen logistik.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Biaro dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan.
- b. Dapat menjadi bahan rujukan dalam topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda tentang evaluasi manajemen logistik alat kesehatan di puskesmas

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Input

a. Tenaga

Tenaga untuk pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas Biaro masih dirangkap oleh petugas laboratorium. Dari segi latar belakang pendidikan, petugas yang berlatar pendidikan sebagai analisis kesehatan tidak sesuai untuk melaksanakan tugas mengelola logistik alat-alat kesehatan.

b. Dana

Puskesmas Biaro selama ini tidak memiliki dana sendiri untuk pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan. Selama ini pengadaan alat kesehatan semua bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Biaro untuk mendukung pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Hal ini terlihat dari sudah adanya gudang penyimpanan, dan transportasi untuk pengadaan alat kesehatan ke puskesmas yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.

d. Metode

Dalam pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan, Puskesmas Biaro tidak memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri oleh pihak puskesmas. Selama ini pengelolaan alat kesehatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

6.1.2. Proses

a. Perencanaan

Puskesmas Biaro melakukan perencanaan kebutuhan alat kesehatan setiap tahunnya. Perencanaan ini disusun berdasarkan daftar kebutuhan alat kesehatan yang diajukan oleh pustu-pustu, polindes-polindes, dan puskesmas induk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Biaro.

b. Penganggaran

Selama ini Puskesmas Biaro tidak melakukan rencana anggaran untuk pengadaan alat kesehatan. puskesmas hanya mengajukan daftar kebutuhan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Agama.

c. Pengadaan

Alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas Biaro semuanya bersumber dari Dinas Kesehatan Agama. Pengadaan oleh dinas kesehatan belum sesuai dengan permintaan puskesmas, selain itu terdapat alat-alat yang diterima namun tidak bisa berfungsi dengan baik.

d. Penyimpanan dan Pendistribusian

Alat-alat kesehatan yang datang dari dinas kesehatan langsung didistribusikan pada unit-unit yang membutuhkan. Pendistribusian alat diutamakan untuk puskesmas induk terlebih dahulu, baru pada pustu-pustu dan polindes yang membutuhkan. Tidak ada penyimpanan dahulu ke gudang penyimpanan. Alat-alat kesehatan yang disimpan di gudang hanya terdiri dari alat-alat yang telah rusak saja.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan alat selama ini hanya sebatas pada perawatan alat seperti sterilisasi alat oleh petugas di ruangan. Pemeliharaan dan perbaikan alat yang rusak tidak dilaksanakan karena petugas pemeliharaan tidak ada.

f. Penghapusan

Penghapusan alat kesehatan belum terlaksana dengan baik. Laporan mengenai daftar alat-alat yang akan dihapus telah disampaikan oleh pihak puskesmas kepada dinas kesehatan, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

g. Pengendalian

Fungsi pengendalian logistik alat kesehatan telah dilaksanakan oleh Puskesmas Biaro. Hal ini terlihat dari telah adanya sistem inventarisasi. Petugas telah membuat kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). KIB dan KIR ini telah diperbarui setiap tahunnya. Pemberian kode barang belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini disebabkan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh petugas pengelola barang yang juga merangkap sebagai petugas laboratorium.

6.1.3. Output

Masih terdapat alat kesehatan yang belum berfungsi optimal seperti dental unit yang sebenarnya bisa diperbaiki agar berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksar; 1996.
2. Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009.
3. Depkes RI. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2015. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009
4. Depkes RI. Pengelolaan Peralatan Kesehatan Puskesmas. Jakarta; Departemen Kesehatan RI: 1999
5. Depkes RI. Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2001
6. Depkes RI. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009; 2009.
7. Juni, Tri, Angkasawati, dkk. Kajian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Web Page [Online] 2006. Dari <http://www.p3skk.litbang.depkes.go.id> [17 Januari 2011]
8. Yuliningsih, Siti Mardiyati. *Analisa sistem pengelolaan perbekalan obat / alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita.* Web Page [Online] 2001. Dari <http://eprints.ui.ac.id/27118/> [19 Januari 2011]
9. Kaltarina, Mike. *Analisa sistim perencanaan obat dan Alkes kebutuhan dasar ruangan di instalasi farmasi RSUD Ciawi Bogor.* Web Page [Online] 2002. Dari <http://eprints.ui.ac.id/25601/> [19 januari 2011]
10. *Prestasi Daerah Kabupaten Agam.* Web Page [Online] 2008. Dari <http://agamkab.go.id> [15 Januari 2011]
11. Puskesmas Biaro. Daftar Inventaris Puskesmas Biaro. Agam: 2010
12. Trihono. Arrimes Manajemen Puskesmas. Jakarta: Sagung Seto; 2005
13. Prasetyo, Adi. Peralatan Kesehatan. Bandung: Angkasa; 2000
14. Depkes RI. Pedoman Pendataan Puskesmas Tahun 2006. Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2006
15. Bowersox. Manajemen Logistik. Jakarta: Bumi Aksara: 1995
16. Widjaja. Manajemen Logistik dan Supply Chan Manajement (Manajemen Rantai Pasokan). Akarta: Harvanda; 2008
17. Setia Putra, Abdi. Manajemen Logistik.Padang: PSIKM FK Unand;2010

18. Dwitara.L, Sumatro.RH. Manajemen Logistik. Jakarta: PT. Grasindo: 2004
19. Hamdan. *Evaluasi Program Kesehatan*. Web page [Online] 2009. Dari <http://anakkesmas.blogspot.com> [16 Januari 2011]
20. Pratama, Dinar. *Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)*. Web Page [Online] 2010. Dari <http://dinarpratama.wordpress.com> [16 Januari 2011]
21. Sarwono, Jonathan. Metode penelitian Kuntitatif dan kualitatif. Yogyakarta; garaham Ilmu; 2006
22. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2009.
23. Munijaya, A. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC; 2004
24. Roza. Analisis Penyelenggaraan Sistem Pemeliharaan Peralatan Radiologi RSUP DR. M. Djamil Padang Tahun 2010 [Skripsi]. Padang : skripsi PSIKM K Unand ; 2010
25. Syamrilaode. *Pengertian Sarana dan Prasarana*. Web Page [Online] 2011. Dari <http://id.shvoong.com> [23 Juni 2011]
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ; 2004
27. Nefriyanti. Analisis Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 [Skripsi]. Padang : skripsi PSIKM FK Unand ; 2010